

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Jangan Hapus KJP Meski Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan

Palmerah, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta agar tetap mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan.

Meskipun kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta bakal diterapkan pada 2025, namun bansos tetap dibutuhkan untuk menunjang pendidikan anak-anak.

Anggota DPRD Jakarta Bun Joi Phiau mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov Jakarta yang mau menerapkan sekolah swasta gratis, sebagaimana rekomendasi Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

Namun politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengingatkan agar bansos pendidikan tetap diadakan sebagai penunjang anak-anak bersekolah.

Salah satunya yakni mempertahankan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang sebagian besar telah diterima peserta didik di sekolah negeri.

Diketahui, wacana penghapusan KJP Plus mengemuka buntut rencana sekolah swasta gratis bagi anak-anak jenjang SD hingga SMA/SMK.

"Bantuan sosial itu masih dibutuhkan, kalau sekolah gratis, maka yang menyangkut tentang sekolah harus dibantu juga," tukas Bun Joi pada Minggu (29/9/2024).

Menurut Bun Joi, bantuan dana yang diterima para peserta didik dari KJP sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan sekolah. Dia mencontohkan, bansos itu bisa digunakan untuk biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.

"KJP tetap diperlukan, karena banyak orang yang tidak mampu. KJP bukan hanya untuk bayar sekolah, tetapi untuk menunjang kebutuhan sekolah, transportasi dan lainnya," sebutnya.

Bun Joi khawatir, tujuan utama program sekolah swasta gratis, yakni tidak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta tidak bisa tercapai jika KJP Plus ditiadakan. Sebab, masih ada beban untuk biaya transportasi dan membeli perlengkapan penunjang sekolah.

"Kalau masih ada biaya yang perlu dikeluarkan dan mereka tak mampu, tetap saja akan ada yang putus sekolah," imbuhnya.

Bun Joi meyakini, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta mampu mengakomodasi bansos tersebut. Apalagi postur APBD Jakarta paling besar dibanding provinsi lainnya di Indonesia, yakni mencapai Rp 80 triliun lebih per tahun.

"Kalau saya yakin kami mampu dengan APBD yang dimiliki untuk alokasi bansos pendidikan," pungkasnya. (fai)